

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amerika Serikat adalah negara adidaya pemenang perang dunia kedua, sebagai negara pemenang Amerika Serikat memiliki hak untuk mengatur keamanan di dunia mengatasnamakan Dewan Keamanan. Kemenangan dalam perang membuat Amerika memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan keamanan internasional, salah satunya pelarangan perakitan nuklir untuk senjata. Kebijakan Amerika Serikat dalam melimitasi perakitan nuklir disebabkan oleh dampak penggunaan senjata nuklir bagi masyarakat dunia (Juanita, 2015). Peristiwa perang dunia kedua yang terjadi di Kota Hiroshima dan Nagasaki yang menimbulkan ribuan korban jiwa akibat bom atom telah mendorong masyarakat dunia untuk menciptakan mekanisme penanganan senjata nuklir, energi atom penggunaannya dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Atas peristiwa ini muncullah IAEA (*International Atomic Energy Agency*)(Mikail, 2018).

Badan ini dibentuk agar penggunaan senjata nuklir tidak semakin menyebar, melucuti persenjataan nuklir di dunia, serta mempertinggi penggunaan nuklir untuk keperluan damai. IAEA sendiri diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Eisenhower yang saat sidang PBB 8 Desember 1953 berpidato mengenai '*Atom for Peace*'. IAEA resmi berdiri pada tanggal 29 Juli 1957 setelah adanya persetujuan dari 81 negara didunia yang telah menyetujui statuta IAEA. Pada sidang IAEA di New York tahun 1968, negara-negara di dunia menyepakati perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*) dibawah kerangka IAEA. Perjanjian ini dibuat untuk mencegah tersebarnya senjata nuklir dan meningkatkan penggunaan nuklir untuk kepentingan damai, dan mempercepat perlucutan senjata nuklir di dunia(Sokolski & Clawson, 2004).

Pasca Perang Dingin, yang menjadi fokus perhatian aktor internasional tidak lagi hanya terpusat pada pertimbangan

kekuatan antara blok Barat dan blok Timur. Isu-isu seputar hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan bebas, perdamaian di Timur Tengah, senjata pemusnah massal (*weapon mass destruction*), dan terorisme adalah isu-isu utama yang menjadi perhatian komunitas internasional. Diantara isu-isu tersebut, isu yang paling banyak menyedot perhatian publik adalah isu Timur Tengah. Hal ini di karenakan kawasan Timur Tengah tidak pernah sepi dari masalah masalah keamanan dan sarat dengan konflik. Pasca tragedi 11 September, Timur Tengah semakin menjadi pusat perhatian dunia, diantaranya akibat perang di Lebanon, munculnya kelompok-kelompok terorisme, krisis di Irak dan Suriah, konflik Israel-Palestina, serta krisis nuklir Iran (Mikail, 2018)

Proyek nuklir Iran dibangun pada tahun 1956 oleh Amerika Serikat. Pada saat itu Iran dibawah presiden Shah Pahlevi memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Pada tahun ini juga penandatanganan MoU pengembangan nuklir Iran dan Amerika Serikat. Iran adalah anggota IAEA dan penandatanganan NPT. Namun pada juni 2003 IAEA memberitahukan bahwa iran tidak melaporkan bahan-bahan serta aktivitas program nuklirnya. setelah kejadian ini IAEA semakin intensif mengawasi perkembangan nuklir iran melaporkannya secara rutin kepada Dewan Keamanan PBB. Pada waktu ini juga Iran dan Negara-negara Uni Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Inggris membuat suatu perjanjian tentang pembatasan dan perkembangan nuklir Iran. Pada bulan oktober 2003, IAEA memberitahukan bahwa Iran sudah mau bekerjasama dan telah memberitahukan program nuklirnya. Pada bulan November IAEA melaporkan kepada dewan keamanan PBB bahwa Iran tidak mengizinkan nuklirnya untuk senjata dan militer (Bâli, 2014)

Pada tahun 2003 hingga 2005 iran telah menyetujui bermacam-macam perjanjian dengan Uni Eropa maupun IAEA. Namun, pada Juni 2005 terjadi pergantian presiden dan Ahmadinejad Selaku presiden melakukan restrukturisasi terhadap tim negosiasi nuklir Iran yang sebelumnya banyak diisi dari kalangan reformis Khatami. Negosiasi Iran-Uni Eropa pun mengalami kegagalan. Pada Juni 2006, setelah kegagalan

negosiasi tersebut, ketiga negara Uni Eropa yaitu Inggris, Prancis dan Jerman bergabung dengan anggota tetap DK PBB lainnya (Amerika Serikat, China dan Rusia) untuk mengajukan proposal baru ke Teheran. Sebulan setelahnya, terjadi perang antara Israel dan Lebanon yang mengakibatkan semakin tingginya tensi keamanan regional, termasuk juga hubungan Iran dan Amerika Serikat. Di tengah krisis perang Israel-Lebanon, negosiasi nuklir Iran semakin alot, Pada akhir tahun 2006, Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo multilateral terhadap Iran yang dianggapnya tidak 'mematuhi' resolusi nuklir(Sheng, Liu, Michelsen, & Xu, 2005).

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 yang dirilis pada Desember 2006 itu memberlakukan sanksi pertama terhadap Iran termasuk pelarangan pengiriman material nuklir dan pembekuan perusahaan-perusahaan Iran yang berkaitan dengan pengembangan nuklir Iran. Disebutkan bahwa sanksi dapat ditangguhkan atau dicabut jika Iran membekukan program pengayaan uraniumnya dan melanjutkan negosiasi dengan negara P5 + 1. Negara-negara P5 + 1 telah mengeluarkan resolusi sebanyak lima kali dalam rangka untuk memperkuat sanksi mereka terhadap program nuklir Iran. Embargo tersebut telah mengakibatkan hubungan bilateral Iran dan Amerika Serikat semakin memanas setelah selama kurang lebih tiga dekade terhitung semenjak "disegelnya" kedutaan Amerika di Teheran pascarevolusi 1979, terjadi ketegangan antara kedua Negara tersebut (Sheng et al., 2005)

Era baru berkaitan dengan krisis nuklir Iran dimulai setelah Ahmadinejad digantikan oleh Hasan Rouhani, presiden yang berasal dari kalangan reformis. Saat itu, Amerika dipimpin oleh Barrack Obama. Ia merupakan presiden yang berasal dari partai Demokrat. Dalam menjalankan pemerintahannya Obama lebih mengedepankan cara-cara diplomasi seperti menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral. Rouhani dan Obama melakukan komunikasi via telepon untuk pertama kalinya, menandai perubahan sikap Pemerintah Iran setelah selama 8 tahun diwarnai sikap tanpa kompromi dari Ahmadinejad. Melalui akun Twitter kantor kepresidenan, Presiden Iran mengonfirmasi pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika

Serikat. Dalam pembicaraan tersebut, baik Rouhani maupun Obama menyatakan keinginan politik bersama mereka untuk cepat memecahkan persoalan nuklir Iran (Auliani, 2013).

Meskipun menimbulkan polemik di dalam negeri, namun secara umum masyarakat internasional menyambut baik upaya kedua kepala pemerintahan tersebut. Sikap Presiden Iran ketujuh ini oleh sebagian pihak dianggap mampu mengurangi tensi di Timur Tengah terutama mengenai kesepakatan nuklir Iran dan P5 +1 yang selama masa periode Ahmadinejad tidak mengalami kemajuan. Pada September 2013 Rouhani berkunjung ke New York untuk hadir dalam Sidang Umum PBB dan menghadiri pertemuan dengan negara P5 +1. Pertemuan tersebut berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk membahas perkembangan nuklir Iran. Setelah hampir 20 bulan melakukan negosiasi yang intens, pada Juli 2015 Iran dan P5 +1 akhirnya mencapai kesepakatan yang dirancang untuk membatasi kemampuan pengayaan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi dari AS, Uni Eropa dan PBB (Mikail, 2018).

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah perjanjian internasional yang dibuat untuk mengontrol ambisi nuklir Iran dengan Imbalan pencabutan sanksi internasional yang diterima Iran. Dicapai oleh Iran dan P5 +1 (China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) pada 14 Juli 2015 (Aljazeera, 2019). Kepatuhan Iran dengan ketentuan terkait nuklir JCPOA akan diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam persetujuan (Davenport, 2018). Selama hampir dua tahun negosiasi, pemerintahan Obama mengatakan niatnya adalah untuk mengatur kembali program nuklir Iran sehingga jika Iran ingin mengejar senjata nuklir, Iran membutuhkan jumlah waktu yang cukup lama untuk menghasilkan bahan fisil yang dibutuhkan (The White House Washington, n.d.).

Untuk memperpanjang waktu breakout tersebut, perjanjian tersebut memberlakukan batasan pada jumlah dan jenis sentrifugal yang dapat dioperasikan Iran, serta ukuran cache uranium yang diperkaya. Rezim inspeksi JCPOA juga bertujuan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahwa Iran dapat

mengembangkan senjata nuklir secara rahasia di lokasi yang tidak diumumkan(Laub, 2019).

Kesepakatan ini mendapatkan reaksi beragam. Sebagian rakyat Iran bersuka ria karena mengira Iran akan segera terbebas dari isolasi dan embargo yang diterapkan Barat selama ini. Dicabutnya embargo ekonomi juga memberi peluang bisnis kepada Iran, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bahwa kini Iran bisa menjual uraniumnya ke pasar bahan bakar dunia. Sementara, Sekjen PBB Ban Ki-moon dan beberapa pejabat tinggi Eropa memuji kesepakatan tersebut. Menurut Ki-moon, “Kesepakatan menghormati kebutuhan dan hak Iran, sementara itu menyediakan kepastian bagi komunitas internasional bahwa aktivitas nuklir di negara tersebut demi tujuan damai”(Kristianti, 2015).

Pada tahun 2016, Amerika Serikat mengalami pergantian kepemimpinan. Rakyat Amerika melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden kembali sebagai pengganti jabatan presiden Barack Obama. Terdapat dua kandidat pada pilpres 2016 diantaranya adalah Hillary Clinton dari partai Demokrat dan Donald Trump dari partai Replik. Saat pilpres tersebut terpilihlah Donald Trump sebagai pemenang yang kemudian menggantikan Obama. Trump memulai karir politiknya dengan mencari nominasi Partai Reformasi untuk pemilihan presiden 2000 dan mengundurkan diri; dia kembali mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan 2012, kemudian barulah tahun 2016 ia menjadi presiden Amerika Serikat(The Biography, 2007)

Setelah dua periode Amerika dipimpin oleh presiden dari partai Demokrat, akhirnya pada saat ini Amerika kembali dipimpin oleh presiden yang berasal dari partai Republik. Partai Republik ini banyak mendapat dukungan dari kalangan pengusaha dan profesional(Cipto, 2003). Banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang menghebohkan dunia yang ia buat saat kampanye pilpres Amerika. Seperti pembangunan tembok besar di wilayah perbatasan Meksiko dengan tujuan supaya orang-orang Meksiko tidak mudah memasuki wilayah Amerika. Ada juga muslim ban dimana orang-orang muslim dari 7 negara yang meliputi Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and

Yemen dilarang memasuki Amerika Serikat. Pada awal-awal Trump menjabat sebagai presiden ia sudah banyak membatalkan kebijakan yang dibuat oleh Barack Obama. Trump ingin mencabut undang-undang tentang kesehatan yaitu Obamacare yang dikeluarkan oleh presiden terdahulu Obama kemudian menggantinya dengan yang lebih murah dan memberikan asuransi untuk semua orang(BBC, 2017).

Selain itu mengenai perjanjian nuklir dengan Iran sejak awal kampanyenya Trump telah berjanji akan menarik Amerika Serikat keluar dari JCPOA atau merenegosiasi perjanjian tersebut. Awal menjabat hingga Oktober 2017, pemerintahan Trump telah melakukan peninjauan kembali mengenai perjanjian ini. Namun pada 8 Mei 2018, Presiden Trump, mencatat bahwa kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, dan kemudian mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi berpartisipasi dalam JCPOA dan akan menerapkan kembali sanksi yang telah ditangguhkan sesuai dengan JCPOA(Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa pemerintahan Donald Trump memutuskan menarik diri dari perjanjian JCPOA?”

C. Landasan Teoritik

1. Konsep Politik Luar Negeri

George Modelki, mendefinisikan politik luar negeri sebagai sistem kegiatan yang dikembangkan oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan asing harus menyoroti cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara lain. Modelski, mencatat hanya aspek-aspek kebijakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara yang ada, sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri (Bojang AS, 2018).

Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya(Mochamad, 2007).

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara(Mochamad, 2007).

Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional(Mochamad, 2007). Barack Obama dan Donald Trump merupakan seseorang yang pernah menjabat dan

sedang menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat. Presiden adalah orang yang membuat atau memutuskan sebuah politik (kebijakan) luar negeri karena presiden mempunyai wewenang sebagai *treaty making power*. Presiden Obama membuat kebijakan luar negeri untuk bergabung dalam keanggotaan kerja sama JCPOA sedangkan Presiden Trump membuat kebijakan luar negeri untuk keluar dari keanggotaan JCPOA tersebut.

Perbedaan kebijakan luar negeri ini tentunya dilandasi oleh perbedaan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Amerika pada saat periode kepemimpinan tertentu. Terdapat sudut pandang lain yang menarik mengenai analisa dari politik luar negeri yang dikemukakan oleh K.J.Holsti. Menurut pandangannya kebijakan luar negeri dan kajian politik internasional akan memusatkan perhatiannya pada perilaku individu dari para pembuat kebijakan. Ahli sejarah diplomasi biasanya menggunakan pendekatan ini, dengan anggapan bahwa perilaku negara sesungguhnya direalisasikan oleh aktor pembuat kebijakan yang merumuskan tujuan, menentukan tindakan dan menggunakan kemampuan nasional untuk mewujudkan tujuan atas nama negara. Terdapat fokus pada tingkat analisis ini yaitu ideologi, motivasi, citacita, persepsi, nilai-nilai dari para aktor pembuat kebijakan suatu negara.

Keputusan politik luar negeri merupakan hasil dari proses yang dilakukan seorang pembuat kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut, seorang *decision maker* dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan yang harus ia ambil sesuai dengan kepentingannya. Untuk dapat mengambil keputusan tersebut maka ia harus bertindak sebagai aktor yang rasional. Aktor rasional yang dimaksud adalah ia membuat sebuah keputusan dengan pertimbangan keuntungan lebih banyak didapatkan daripada kerugian yang ditanggung. Trump dihadapkan pada dua pilihan yaitu pilihan untuk tetap masuk dalam negosiasi JCPOA atau menarik diri dari negosiasi tersebut. Sebagai aktor rasional, ia harus mengambil satu keputusan dari dua pilihan yang ada. Keputusan tersebut harus ia pertimbangkan

berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat ditentukan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan yang ia ambil. Donald Trump harus berfikir rasional untuk membuat keputusan akan tetap masuk dalam negosiasi JCPOA atau keluar dari negosiasi JCPOA tersebut.

2. Rational Choice Theory

Graham T Allison membuat tiga model paradigm untuk menjelaskan *decision making process* politik luar negeri suatu negara. Model yang pertama yaitu model actor rasional. Model ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri yang dibuat tentunya didasari oleh pertimbangan yang rasional. Kebijakan yang akan dibuat tentunya dipertimbangkan tujuan serta dampak dari kebijakan tersebut. Menghasilkan untung banyak atau malah akan menimbulkan kerugian. Model yang kedua adalah model proses organisasi, model ini menjelaskan bahwa politik luar negeri yang dibuat itu melewati tahapan maupun prosedur kerja baku. Kebijakan yang dibuat dianggap sebagai hasil dari organisasi. Hasil ini dibuat dengan mempertimbangkan sasaran serta tujuan organisasinya. Keputusan hasil dari model ini tentunya merupakan prioritas organisasi. Model yang terakhir adalah model politik birokratik. Di dalam model ini dijelaskan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan hasil dari *bargaining* para *stakeholder* terkait. Perumusan politik luar negeri dilakukan oleh aktor, kelompok serta kelompok kepentingan suatu Negara (Bekarekar, 2016).

Untuk menyelesaikan kasus ini peneliti menggunakan model aktor rasional. Di dalam Model actor rasional, politik luar negeri dianggap sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor yang dipandang rasional di dalam suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan (Mas'ood, 1990). Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai sebuah proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu melalui serangkaian tahap-tahap

intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh, berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada (Duncan Snidal, 2012).

Jadi unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu. Seorang analisis dianggap sudah bisa menjelaskan suatu politik luar negeri kalau ia bisa menunjukkan bahwa kebijakan yang sedang dipelajarinya itu merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa yang bersangkutan.

Model ini menggambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka terapkan.

Dalam model ini para pembuat keputusan dianggap rasional dan umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Oleh karena itu, model ini lah yang paling sering digunakan untuk menjelaskan politik luar negeri. Dengan cara berasumsi bahwa mereka itu rasional dan kemudian menempatkan diri mereka pada posisi mereka, para pembuat keputusan luar negeri dapat menjelaskan dan menganalisa mengapa mereka melakukan sesuatu (membuat sebuah kebijakan luar negeri).

Dalam hal ini kita juga berasumsi bahwa pemerintahan di negara ini merupakan pemerintahan yang monolit dan

tidak tepecah belah, serta setiap kejadian penting (politik luar negeri) pasti disebabkan oleh sesuatu yang penting juga. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri presiden dipengaruhi oleh brokrasinya, kelompok kepentingan, dan opini publik yang ada di negara tersebut. Dalam negara demokrasi, politik luar negeri tidak dapat terpisahkan oleh adanya tuntutan dari politik domestiknya. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh aktor pembuat kebijakan tidak murni berasal dari pemikirannya sebagai aktor yang rasional, melainkan adanya faktor lain yang terlibat. Sama halnya dengan negara Amerika Serikat, negara ini merupakan negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi di dalam pemerintahannya.

Aktor yang berperan penting di dalam pembuatan keputusan luar negeri Amerika Serikat adalah presiden. Seorang presiden sebagai pembuat kebijakan yang rasional mendapatkan pengaruh-pengaruh dari kelompok kepentingan yang kuat di negara tersebut, serta adanya opini dari masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Sebagai kompensasi atas dukungan yang telah diberikan oleh para pendukungnya, maka Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang akan memberikan keuntungan bagi para kelompok kepentingan yang telah mendukungnya. Sebagai seorang pembuat keputusan dengan pemikiran yang rasional Donald Trump memutuskan untuk keluar dari negosiasi JCPOA. Dalam teori ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan (Mas'ood, 1990).

Tujuan dari Donald Trump membuat kebijakan penarikan diri dari JCPOA adalah sebagai upayanya untuk menindaklanjuti janji kampanyenya. Dimana dari janji kampanye ini, Trump dapat memenangkan pemilu karena banyaknya pendukung yang tertarik terhadap isu tersebut. Di dalam kampanye dahulu trump telah mengatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian terburuk yang pernah ada dan trump mengatakan ingin mengakhirinya karena

menurutnya perjanjian ini sangat merugikan bagi Amerika Serikat dan sekutu Timur Tengahnya. Selain itu, Trump telah berjanji kepada Perdana Menteri Israel, Netanyahu bahwa ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Dukungan Trump terhadap Israel juga dipengaruhi oleh orang kepercayaan trump yaitu menantunya yang merupakan orang kaya Yahudi(Cipto, 2018).

Faktor-faktor inilah yang membuat kebijakan politik luar negeri Trump cenderung pro-Israel. Kepentingan nasional Amerika Serikat selalu paralel dengan kepentingan nasional Israel. Bahkan prioritas utama kepentingan nasional Amerika Serikat adalah menjaga keamanan Israel. Yang dianggap ancaman utama oleh Israel adalah Iran, karena Iran selalu memberikan bantuan kepada bangsa Palestina dalam upaya meraih kemerdekaan. Isu senjata nuklir dimanfaatkan Amerika Serikat dan Israel untuk menciptakan opini bahwa Iranlah ancaman bagi Timur Tengah.

Konsistensi Iran dalam melawan Israel dan membela Palestina menjadi batu sandungan yang amat besar bagi Israel untuk mewujudkan impiannya, yaitu memadamkan perlawanan bangsa Palestina dan mendominasi Timur Tengah. Karena Iran satu-satunya negara kuat di kawasan yang menolak kehadiran Israel di Timur Tengah (selain Suriah, dan milisi Hezbollah), Israel sangat berkepentingan melemahkan Iran, melalui tangan AS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya AS menghalangi pengembangan nuklir Iran, termasuk juga langkah AS menarik diri dari JCPOA sangat terkait dengan kepentingan AS untuk melindungi Israel (Mikail, 2018).

Sementara itu alasan rasional lain yang membuat Trump ingin mengakhiri perjanjian JCPOA ini ialah kedekatannya dengan Arab Saudi. Kedekatan Trump dengan Arab Saudi disebabkan oleh pengalamannya sebagai pengusaha internasional, yang mana Trump tau persis bahwa Amerika memiliki hutang lebih dari seratus milyar dolar Amerika pada Arab Saudi. Selain itu Trump juga merasa negara Teluk merupakan sumber investasi yang dapat di manfaatkan Amerika untuk memperbaiki perekonomiannya.

Apalagi perjanjian pembelian senjata Arab Saudi yang membuat Trump sangat pro-saudi. Bagi Trump Arab Saudi adalah lahan bisnis bagi Amerika, sehingga Amerika harus membuat kebijakan luar negeri pro-Saudi. Salah satu keputusan yang pro-Saudi dan pro-Israel ialah keputusan menarik diri dari perjanjian JCPOA dengan Iran. Bagi Arab Saudi perjanjian JCPOA yang dibuat oleh Obama ini sangatlah menguntungkan Iran. Hal ini membuat Arab Saudi maupun Israel terancam dengan eksistensinya di Timur Tengah. Perjanjian ini dianggap dapat melemahkan kekuatan Arab Saudi maupun Israel di Timur Tengah(Cipto, 2018).

Tabel 1. 1 *Benefits* dan *Costs* keluar dari perjanjian JCPOA

	<i>Benefits</i>	<i>Costs</i>
Keluar dari perjanjian JCPOA	Menjaga hubungan baik dengan Israel dan Arab Saudi	Hubungan dengan Iran terputus
	Mencegah kembali menguatnya perekonomian Iran	
	Melemahkan hegemoni Iran di Timur Tengah	Memburuknya citra AS di mata pendukung JCPOA
	Mencitrakan pemimpin yang dapat menepati janji kampanyenya	
	Mencegah rudal balistik iran berkembang	
Tetap dalam perjanjian JCPOA	Menjaga citra AS yaitu menepati komitmen yang telah dibuat bersama	Adanya masa kadaluarsa pada pembatasan pengembangan nuklir Iran
		Adanya Ancaman rudal balistik yang tengah dikembangkan Iran
		Memburuknya hubungan dengan Arab Saudi dan Israel
	Hubungan baik dengan Iran tetap terjalin	Menguatnya perekonomian Iran

D. Hipotesa

Alasan Pemerintahan Donald Trump menarik diri dari perjanjian JCPOA ini berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: Keputusan Trump merupakan bentuk perwujudan janji kampanyenya semasa pemilu yang menyatakan ingin merenegosiasi perjanjian JCPOA. Serta dorongan dari sekutu Amerika di Timur Tengah (Israel dan Arab Saudi) yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian JCPOA tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mengapa pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian JCPOA.
2. Membuktikan bahwa Donald Trump memilih keputusan yang rasional atau menguntungkan dalam rangka mendukung kepentingan sekutunya di Timur Tengah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif, dimana metode pengumpulan data-data yang menunjang dilakukan dengan cara kajian pustaka yaitu dengan memanfaatkan berbagai literatur seperti buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Sehingga melalui sumber-sumber tersebut dapat dijadikan acuan dalam membantu mengkaji dan menyelesaikan skripsi.

G. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dilakukan dengan maksud untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai perbandingan pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam keanggotaan JCPOA pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump, maka penulis membatasi penelitian ini dari tahun 2015 dimana tahun ini Amerika Serikat pertama kali bergabung dalam perjanjian JCPOA. Kemudian pada tahun 2018 Amerika Serikat resmi keluar dari keanggotaan JCPOA.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, implementasi teori, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang profil perjanjian Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) yang mencakup latar belakang berdirinya, negara anggota, tujuan, dan program-program dari JCPOA. Penulis akan menjelaskan bagaimana proses bergabungnya Amerika Serikat dalam perjanjian JCPOA dan kepentingan apa yang dimiliki Obama dibalik keputusan tersebut.

BAB III berisi tentang politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump yang dijelaskan dalam tiga focus kebijakan yaitu dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.

BAB IV berisi hipotesa yang berupa perwujudan janji kampanye serta dorongan sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah (Israel dan Arab Saudi) untuk keluar dari perjanjian JCPOA.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan dari BAB I-IV.